

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Kendal yang dilihat melalui 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan dan responsivitas masih memiliki masalah yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberjalanan kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal masih belum berjalan baik karena mayoritas indikator masih menemui kendala. Penilaian atas temuan tersebut diantaranya adalah:

1. Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kendal

A. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas dalam kebijakan dinilai melalui pencapaian tujuan dari kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Kendal. Aspek efektivitas masih menemui permasalahan karena belum tercapainya tujuan pemenuhan hak anak atas pendidikan 12 tahun, perlindungan khusus anak melalui SRA dan sinergitas dan kolaborasi antar pihak.

B. Efisiensi Kebijakan

Efisiensi dalam kebijakan dilihat melalui banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keberjalanan kebijakan Kabupaten

Layak Anak pada klaster IV yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Kendal telah memiliki dukungan usaha untuk mencapai hasil yang diharapkan berupa tersedianya SDM, target waktu pelaksanaan kebijakan dan alokasi biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

C. Kecukupan Kebijakan

Kecukupan dalam kebijakan mengukur seberapa jauh pencapaian hasil yang dapat memecahkan masalah. Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Kendal dinilai belum mencukupi. Hal ini karena kebijakan belum sepenuhnya dapat berdampak pada penyelesaian masalah yang terjadi di Kabupaten Kendal yaitu masalah kekerasan pada anak, masih cenderung rendahnya rata-rata lama sekolah sehingga ikut mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angkat Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, fasilitas pendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV masih menemui masalah terkait kualitasnya dan pemerataannya.

D. Pemerataan Kebijakan

Pemerataan memiliki arti yang sama dengan keadilan. Pemerataan dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Kendal dinilai belum merata dalam dunia pendidikan karena masih ditemui ketimpangan dalam pelaksanaannya seperti belum tersedianya guru

pendamping khusus untuk anak disabilitas pada sebagian besar sekolah umum di Kabupaten Kendal padahal sekolah umum diperbolehkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Selain itu, jumlah SLB di Kabupaten Kendal juga masih terbatas.

E. Responsivitas Kebijakan

Responsivitas kebijakan berarti menilai mengenai tanggapan OPD Kabupaten Kendal dan tenaga pendidik selaku pemilik dan pelaksana kebijakan serta tanggapan masyarakat termasuk anak sebagai target kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV. Responsivitas yang diperoleh dari OPD di Kabupaten Kendal dan sebagian pihak sekolah adalah adanya kekurangan dalam pemahaman, sikap memprioritaskan, komunikasi dan koordinasi. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang kurang memahami dan peduli terhadap pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya anak sehingga masih menimbulkan adanya ATS, anak berurusan dengan hukum dan pernikahan dini.

F. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Kendal merupakan tingkat kebermanfaat yang diberikan kebijakan terhadap anak sebagai target. Tujuan dari kebijakan ini dapat dikatakan dibuat sesuai dengan kebutuhan anak dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sehingga kebijakan sudah tepat.

2. Faktor Penghambat Kebijakan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kendal

Faktor internal yang turut menghambat kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Kendal merujuk pada faktor yang ada pada Pemerintah Daerah atau OPD terkait yaitu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, fasilitas yang disediakan untuk mendukung kebijakan dan penyediaan anggaran bagi setiap rencana aksi kebijakan. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi berasal dari hal-hal yang ada diluar Pemerintah Daerah seperti dukungan dari mitra non-pemerintah, peranan tenaga pendidik dalam kebijakan dan partisipasi masyarakat.

4.2 Saran

Melalui temuan penelitian dan terkait faktor penghambat yang ada maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Integrasi Kebijakan KLA ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD)

Rekomendasi utama untuk mengatasi lemahnya komitmen pemerintah daerah adalah dengan mengintegrasikan indikator dan program Kabupaten Layak Anak (KLA) ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Langkah ini penting karena menjadikan KLA sebagai bagian dari prioritas pembangunan resmi, bukan sekadar kebijakan tambahan. Sebagai langkah jangka pendek (*quick wins*) pemerintah daerah dapat segera memasukkan beberapa

indikator KLA ke dalam program tahunan OPD melalui surat edaran atau instruksi, seperti target Sekolah Ramah Anak dan kegiatan budaya anak. Sebagai langkah jangka panjang (*structural reform*) seluruh indikator dan program KLA perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD secara permanen, dengan alokasi anggaran, monitoring, dan evaluasi sistematis.

2. Optimalisasi Penyediaan Fasilitas dengan Skema Prioritas dan Kolaborasi

Rekomendasi untuk mengatasi belum meratanya penyediaan fasilitas pendukung kebijakan KLA adalah dengan menerapkan skema prioritas pembangunan berbasis kebutuhan daerah serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Langkah jangka pendek (*quick wins*) yang dapat dilakukan adalah pemerintah daerah dapat segera melakukan pendataan fasilitas KLA yang ada dan belum merata, kemudian menyesuaikan pemanfaatannya melalui perbaikan minor, seperti penambahan peralatan bermain, jalur aman untuk anak di sekitar sekolah, serta pengaturan penggunaan RTH agar anak dapat mengakses ruang bermain dan kegiatan budaya tanpa gangguan. Sementara pada langkah jangka panjang (*structural reform*), pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas KLA secara merata. Pengaturan regulasi penggunaan fasilitas umum juga harus diperkuat agar sesuai fungsi dan ramah anak, sehingga kebijakan KLA dapat berkelanjutan dan diakses semua anak, termasuk di wilayah pedalaman.

3. Optimalisasi Penyediaan Anggaran untuk Setiap Rencana Aksi Kebijakan KLA

Untuk memastikan jalannya kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada klaster IV di Kabupaten Kendal berjalan efektif, alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dari setiap rencana aksi yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD KLA). Sebagai langkah jangka pendek (*quick wins*), Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran saat ini untuk memastikan dana yang ada cukup untuk program prioritas, seperti pengembangan Sekolah Ramah Anak, fasilitas ruang bermain, dan kegiatan pemanfaatan waktu luang serta budaya anak. Peningkatan transparansi penggunaan anggaran juga perlu dilakukan melalui laporan bulanan yang dapat diakses oleh semua OPD terkait, serta mekanisme koordinasi dengan sekolah untuk memastikan Dana BOS digunakan secara optimal dan sesuai regulasi. Untuk langkah jangka panjang (*structural reform*), perlu dibuat mekanisme integrasi anggaran KLA ke dalam perencanaan tahunan OPD terkait, termasuk penyusunan indikator kinerja berbasis *output* dan *outcome*.

4. Penguatan Kemitraan Strategis KLA

Dukungan dari mitra non-pemerintah merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kemitraan strategis dengan pihak swasta, dunia usaha, dan media massa. Langkah jangka pendek (*quick wins*) yang dapat dilakukan adalah menyusun daftar resmi mitra non-pemerintah dan mengadakan

pertemuan koordinasi rutin untuk meningkatkan sinkronisasi program yang mendukung KLA. Sedangkan langkah jangka (*structural reform*) panjang meliputi pembentukan mekanisme kemitraan formal melalui nota kesepahaman (MoU) yang menetapkan peran, tanggung jawab, target, serta evaluasi berkala terhadap kontribusi mitra dalam pencapaian indikator KLA.

5. Peningkatan Kapasitas Guru untuk Sekolah Ramah Anak (SRA)

Peran tenaga pendidik sangat krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, inklusif, dan terbebas dari kekerasan. Untuk itu, peningkatan kapasitas guru perlu menjadi fokus utama. Langkah jangka pendek (*quick wins*) yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan singkat bagi tenaga pendidik mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA), penanganan kekerasan, dan pengembangan karakter anak, yang dapat langsung diterapkan di sekolah. Sedangkan langkah jangka panjang (*structural reform*) mencakup integrasi nilai SRA, pendidikan karakter, dan anti-kekerasan ke dalam kurikulum wajib bagi guru baru, disertai sistem monitoring dan evaluasi internal sekolah secara berkelanjutan.

6. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Partisipasi masyarakat merupakan faktor eksternal yang sangat krusial untuk mendukung keberhasilan kebijakan KLA, khususnya dalam pengawalan hak anak dan pencegahan praktik pernikahan dini. Langkah jangka pendek (*quick wins*) yang dapat dilakukan adalah mengadakan kampanye melalui media lokal, tokoh masyarakat, dan forum komunitas untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan anak. Sementara itu,

langkah jangka panjang (*structural reform*) meliputi pembentukan forum partisipasi masyarakat formal di tingkat desa atau kelurahan yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat untuk mengawal implementasi KLA secara berkelanjutan.